

**PENGAWASAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DI DINAS
PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh :

**NEFRINGGA AMALIA
2216041078**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
PENGAWASAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DI DINAS
PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Nefringga Amalia

Permasalahan banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur drainase belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kondisi tersebut adalah lemahnya fungsi pengawasan (*controlling*) dalam pelaksanaan proyek pembangunan drainase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung terhadap proyek pembangunan drainase serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis pengawasan menggunakan kerangka teori Siagian (2008) yang meliputi lima indikator, yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, evaluasi, identifikasi penyimpangan, dan tindakan korektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kondisi lapangan yang kompleks, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga fungsi drainase.

Kata kunci: pengawasan, pembangunan drainase, Dinas Pekerjaan Umum, banjir, Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT

**PENGAWASAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DI DINAS
PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BANDAR LAMPUNG**

BY

Nefringga Amalia

Recurring flooding problems in Bandar Lampung City indicate that the development of drainage infrastructure has not been optimally implemented. One of the key factors influencing this condition is the weak controlling (supervision) function in the implementation of drainage construction projects. This study aims to analyze the implementation of the supervision function carried out by the Public Works Department of Bandar Lampung City in drainage development projects and to identify internal and external factors that hinder the effectiveness of supervision. This research employs a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include in-depth interviews, field observations, and documentation. The supervision analysis is based on Siagian's (2008) theoretical framework, which consists of five indicators: standard setting, performance measurement, evaluation, identification of deviations, and corrective actions. The results show that the supervision function carried out by the Public Works Department of Bandar Lampung City has been implemented; however, it has not yet been fully effective. Supervision still faces various obstacles, such as limited human resources, budget constraints, complex field conditions, and low community participation in maintaining drainage functions.

Keywords: supervision, drainage development, Public Works Department, flooding, Bandar Lampung City.

**PENGAWASAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DI DINAS
PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

**NEFRINGGA AMALIA
2216041078**

**Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: PENGAWASAN PROYEK PEMBANGUNAN
DRAINASE DI DINAS PEKERJAAN UMUM
(PU) KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: *Nefringga Amalia*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216041078

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

NIP. 198506202008122001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.

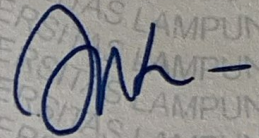
NIP. 197009142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

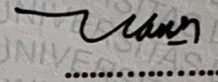
Ketua

: **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**



Penguji

: **Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si**

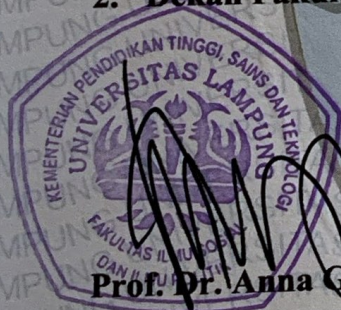


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Mei 2026



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 06 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Netringga Amalia
NPM. 2216041078

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nefringga Amalia, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 November 2002, yang merupakan anak Kedua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Yudi Antoni dan Ibu Surothin S. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) AL-Ulya dan selesai pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD N 1 Sukabumi Indah yang selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP N 24 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMA N 12 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik guna menunjang pengembangan kapasitas diri. Penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, serta mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat fakultas, yaitu LSSP Cendekia. Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat fakultas. Pada tahun 2024, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Purwoadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, pada tahun 2025 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd ayat: 11)

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.”

(R.A. Kartini)

“Perjalanan ini penuh luka, tekanan, dan keraguan, namun aku tidak berhenti, karena aku tahu tujuan ini layak diperjuangkan.”

(Nefringga Amalia)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta rida terhadap ikhtiar hamba-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita harapkan di yaumul akhir.

Dengan segala kerendahan hati, karya ilmiah ini ku persembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan kukasihi, khususnya kedua orang tuaku tercinta.

**Ayah Dan ibuku,
Yudi Antoni S.T dan Surothin**

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti. Kerja keras dan ketulusan yang tidak pernah mengenal lelah menjadi sumber kekuatan bagi penulis hingga mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Ayuk tersayang, Fika Merliana, S.T., Terima kasih telah menjadi tempat pulang di setiap lelah, tempat berbagi di setiap cerita, dan sumber kekuatan saat penulis hampir menyerah. Adik-adikku tersayang, Cyeo dan Zigi, terima kasih karena selalu menghadirkan keceriaan di tengah lelah dan menjadi penyemangat dalam setiap langkah yang penulis jalani. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan memberikan kerukunan di antara kita.

Sahabat dan teman-temanku, yang selalu hadir di sekelilingku, memberikan bantuan, dukungan, serta menghadirkan kisah-kisah indah dalam perjalanan perkuliahanku.

Para pendidik, yang berdedikasi telah membekaliku ilmu pengetahuan serta dukungan yang tulus.

Almamater Tercinta , Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum watahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul "**Pengawasan Proyek Pembangunan Drainase Di Dinas Pekerjaan Umum (Pu) Kota Bandar Lampung.**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N.) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Seiring dengan hal tersebut, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian, selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang selalu kalian berikan hingga aku bisa sampai di titik ini. Kalian adalah alasan aku tetap kuat dan tidak pernah merasa kekurangan, karena semua telah kalian usahakan dengan sepenuh hati. Ayah, terima kasih atas kerja keras yang tidak pernah berhenti demi keluarga, bahkan di saat lelah sekalipun Ayah tetap bertahan. Ibu, terima kasih atas cinta yang begitu tulus, kesabaran yang tidak terbatas, serta segala hal yang telah Ibu berikan demi masa depan anak-anakmu. Tidak akan pernah cukup kata untuk membalas semua kebaikan kalian, namun aku akan selalu berusaha menjadi anak yang bisa membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu.

2. Untuk Ayuk tersayang, Fika Merliana, S.T., yang selalu menjadi tempat pulang dalam setiap proses dan keputusan hidup penulis, meskipun kini kita sudah tidak lagi berada dalam satu rumah. Terima kasih karena tetap hadir, mendengarkan tanpa lelah, dan memberikan dukungan di setiap langkah yang penulis lalui. Sosok yang selalu menguatkan di saat lemah, menenangkan di saat ragu, dan menjadi alasan penulis untuk terus bertahan hingga sampai di titik ini. Terima kasih atas perhatian, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Semoga segala kebaikan Ayuk dibalas dengan kebahagiaan yang berlipat, dan semoga Ayuk selalu ada di setiap langkah perjalanan hidup penulis ke depannya.
3. Untuk adik tersayang, Cyeo dan Zigi, terima kasih sudah menjadi adik-adik yang baik dan selalu ada di setiap momen penulis, baik saat menghadapi kesulitan maupun saat merasakan kebahagiaan. Kehadiran kalian bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi juga memberikan alasan bagi penulis untuk tetap bertahan dan terus melangkah dalam setiap proses yang dijalani hingga sampai di titik ini. Penulis akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian, tumbuhlah lebih baik dan menjadi versi yang paling hebat, adiku.
4. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing utama penulis, terima kasih atas ketulusan dan kesabaran Miss dalam membimbing penulis hingga sampai di titik ini. Di saat penulis merasa ragu, arahan dan perhatian Miss menjadi penguat untuk terus melangkah dan mempercayai proses yang dijalani. Ilmu dan nasihat yang diberikan tidak hanya menjadi bekal dalam dunia akademik, tetapi juga membentuk cara berpikir dan sikap penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan, serta segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Semoga segala ilmu yang diberikan terus bermanfaat sepanjang waktu.

5. Prof. Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si., selaku dosen pembahas dan penguji skripsi penulis, terima kasih atas perhatian, ketelitian, serta waktu yang telah diberikan dalam memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Setiap arahan yang diberikan menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan karya ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah serta pengabdian yang dijalankan.
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si., selaku dosen pembimbing akademik (PA), terima kasih atas ilmu, arahan, waktu, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi. Setiap bimbingan yang diberikan menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan tahap ini. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan Ibu dalam membimbing membawa keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan.
7. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., prof. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M.Si., ibu Dr. Dian Kagungan M.H, Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., bapak Eko Budi Sulistio., S. Sos., M. AP., bapak Nana Mulyana, S. IP., M.Si., Ibu Dr. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. A., bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA., bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M. P.A., Ms. Devi Yulianti S.A.N., M.A., Ph.DM.A., Ph.D, ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., bapak Apandi, S. Sos., M.Si., bapak Dodi Faedulloh., S. Sos., M.Si., ibu Vina Kamilasari, S.Pd., M.Si., ibu Anisa Utami, S. IP., M.A., bapak M. Irsyad Fadoli, S.A.P, M.A.P., ibu Kholifatul Munawaroh, S.A.N., M.Si. Bapak Vincensius Soma Ferrer, S.A.N., M.Si., Ibu Ayu Wulandari S.A.N., M.Si.

Semoga ilmu yang telah diperoleh penulis selama proses perkuliahan dapat menjadi berkah dan menjadi berharga dalam kehidupan penulis kedepannya.

10. Mba Uki, Mba Vivi dan Mba Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang banyak membantu dalam menyusun berkas administrasi selama masa perkuliahan termasuk dalam proses pengrjaan skripsi semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan.
11. Kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan WALHI yang telah memberikan izin, bantuan, serta bersedia mendukung penulis selama proses penelitian, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan, dan informasi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, serta keberkahan. Penulis juga memohon maaf apabila selama proses penelitian terdapat hal-hal yang kurang berkenan.
12. Untuk seseorang yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, pemilik NPM 2213032044 yang selalu menemani setiap proses penulis. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang diberikan selama ini. Kehadiranmu memiliki arti tersendiri dalam perjalanan ini. Semoga kita bisa lulus bersama dan meraih kesuksesan di masa depan.
13. Teman seperjuangan semasa kuliah Natasya, Marini, Sherina, Abel, Jihan, Celu, Winda, Eci, dan Tika, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Kalian bukan sekadar teman, tetapi juga tempat berbagi cerita, tempat pulang di tengah rasa lelah, dan alasan penulis untuk tetap bertahan di setiap proses yang tidak selalu mudah. Di setiap tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lalui bersama, ada kekuatan yang membuat penulis mampu terus melangkah hingga sampai di titik ini. Semua kenangan yang kita ciptakan akan selalu hidup dan menjadi bagian yang tidak tergantikan dalam perjalanan hidup

penulis. Semoga waktu dan jarak tidak pernah menghapus kedekatan ini, dan semoga kita semua dipertemukan kembali dalam keadaan terbaik, dengan cerita keberhasilan yang kita perjuangkan hari ini. *See u on top guys.*

14. Teman-teman PKL di DPRD Kota Bandar Lampung, Natasya, Celo, Bella, Anna, dan Rihha. Terima kasih atas kebersamaan serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa PKL. Kehadiran kalian tidak hanya sebagai rekan dalam kegiatan PKL, tetapi juga sebagai teman yang saling membantu, berbagi ilmu, dan memberikan semangat dalam setiap proses yang dijalani. Penulis juga mengucapkan terima kasih karena telah menjalin hubungan yang baik hingga saat ini. Semoga kebersamaan dan silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga, serta kita semua senantiasa diberikan kesuksesan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah ke depan.
15. Teman-teman KKN di Kampung Purwoadi. Terima kasih atas semua momen yang telah kita ciptakan dan lalui selama pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang luar biasa selama pelaksanaan KKN. Setiap proses yang kita jalani bersama, mulai dari masa pra-KKN, pencarian tempat tinggal, perencanaan program kerja, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi, telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Kebersamaan tersebut menghadirkan banyak cerita, tawa, dan pelajaran hidup yang tidak akan terlupakan. Semoga semua kenangan baik ini tetap terjaga dan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita ke depan.
16. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2022 AMPATRA. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama masa perkuliahan, dari awal hingga sampai di titik ini. Terima kasih juga atas dukungan, kerja sama, serta bantuan yang diberikan dalam berbagai proses yang dijalani bersama. Banyak momen dan pengalaman yang telah dilewati bersama menjadi kenangan yang berkesan selama perkuliahan.

Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam setiap langkah ke depan dan dapat meraih kesuksesan masing-masing.

17. Kepada staf DPRD Kota Bandar Lampung, terkhusus pada Bagian Umum, serta seluruh staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan selama masa kegiatan berlangsung. Kebersamaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses perkuliahan penulis serta memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga.
18. Serta kepada semua pihak yang belum sempat penulis sebut namanya yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
19. *Lastly, for myself*, yang telah bertahan, melewati, dan menyelesaikan setiap tanggung jawab hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah, bahkan di saat keadaan terasa berat dan penuh keraguan. Terima kasih karena tetap berani menghadapi setiap kegagalan, menerima setiap kekurangan, dan terus bertumbuh melalui setiap proses yang tidak mudah. Perjalanan ini telah mengajarkan banyak hal tentang kuatnya diri, kesabaran, dan arti bertahan. Semoga ke depan aku dapat terus melangkah dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih bijaksana, dan keyakinan yang tidak mudah goyah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini, mengingat keterbatasan yang ada. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan yang berlipat, dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat, walau sederhana, bagi siapa pun yang membacanya.

Bandar Lampung, 26 April 2026

Nefringga Amalia

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|--------------|
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2 Tinjauan tentang Manajemen Strategis..... | 15 |
| 2.3 Tinjauan tentang Fungsi Pengawasan | 16 |
| 2.3.1 Definisi Fungsi Pengawasan | 16 |
| 2.3.2 Model-Model Pengawasan..... | 17 |
| 2.3.3 Unsur-Unsur dalam Fungsi Pengawasan | 18 |
| 2.4 Tinjauan tentang Fungsi dan Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Proyek Pembangunan Drainase | 20 |
| 2.5 Kerangka Berpikir Penelitian..... | 22 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 23 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 23 |
| 3.2 Fokus Penelitian..... | 24 |
| 3.3 Lokasi Penelitian..... | 25 |
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data | 26 |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data..... | 27 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 29 |
| 3.6.1 Reduksi Data | 30 |
| 3.6.2 Penyajian Data | 30 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 3.6.3 | Penarikan Kesimpulan/Verifikasi | 30 |
| 3.7 | Teknik Keabsahan Data | 31 |
| 3.7.1 | Kredibilitas | 31 |
| 3.7.2 | Transferabilitas | 32 |
| 3.7.3 | Dependabilitas | 32 |
| 3.7.4 | Konfirmabilitas | 32 |
| IV. | HASIL DAN PEMBAHASAN | 34 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 34 |
| 4.1.1 | Gambaran umum Kota Bandar Lampung | 34 |
| 4.1.2 | Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung | 37 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 60 |
| 4.2.1 | Pelaksanaan Fungsi <i>Controlling</i> (Pengawasan) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Terhadap Proyek Pembangunan Drainase | 60 |
| 4.2.1.1 | Hasil Pengawasan Berdasarkan Penetapan Standar | 61 |
| 4.2.1.2 | Hasil Pengawasan Berdasarkan Pengukuran Pelaksanaan | 64 |
| 4.2.1.3 | Hasil Pengawasan Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan | 66 |
| 4.2.1.4 | Hasil Pengawasan Berdasarkan Identifikasi Penyimpangan | 69 |
| 4.2.1.5 | Hasil Pengawasan Berdasarkan Tindakan Korektif | 72 |
| 4.2.2 | Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan Proyek Pembangunan Drainase di Kota Bandar Lampung | 74 |
| 4.3 | Pembahasan | 81 |
| 4.3.1 | Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (<i>Controlling</i>) Pembangunan Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung | 81 |
| 4.3.1.1 | Analisis Indikator Standar dalam Pelaksanaan Pengawasan | 84 |
| 4.3.1.2 | Analisis Indikator Pengukuran dalam Pelaksanaan Pengawasan | 86 |
| 4.3.1.3 | Analisis Evaluasi Pengawasan dalam Proyek Pembangunan | 88 |
| 4.3.1.4 | Analisis Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengawasan | 89 |
| 4.3.1.5 | Analisis Indikator Tindakan Koreksi dalam Pelaksanaan | 91 |
| 4.3.2 | Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Proyek Pembangunan Drainase di Kota Bandar Lampung | 94 |
| V. | KESIMPULAN DAN SARAN | 103 |
| 5.1 | Kesimpulan | 103 |
| 5.2 | Saran | 103 |
| | Saran untuk Penelitian Selanjutnya : | 105 |

| | |
|----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 106 |
| LAMPIRAN..... | 111 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Sebaran Titik Rawan Banjir di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kecamatan Dan Kelurahan..... | 2 |
| 2. Data Kejadian Banjir di Bandar Lampung..... | 3 |
| 3. Penelitian Terdahulu | 12 |
| 4. Daftar Informan Penelitian..... | 27 |
| 5. Indikator Proyek Pembangunan Drainase..... | 43 |
| 6. Capaian Indikator Pengawasan Pembangunan Drainase | 44 |
| 7. Daftar Tim Pengawasan Pembangunan Drainase dan Tugas Pokok dalam Pelaksanaan Pengawasan | 48 |
| 8. Matriks Hasil Penelitian..... | 100 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Kegiatan pembangunan drainase yang sedang berlangsung di Kecamatan Sukarame..... | 10 |
| 2. Unsur-Unsur dalam Pengawasan | 19 |
| 3. Kerangka Berpikir Penelitian..... | 22 |
| 4. Komponen dalam Analisis Data..... | 29 |
| 5. Bagan Metode Penelitian | 33 |
| 6. Peta Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung..... | 37 |
| 7. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Drainase di Kota Bandar Lampung..... | 63 |
| 8. Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Drainase Oleh Seno Aji di Loa Ipuh Pada 7 November 2025..... | 64 |
| 9. Kegiatan Evaluasi Lapangan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung..... | 67 |
| 10. Kondisi Saluran Drainase di Jalan Pulau Pisang, Lingkungan 1, Kelurahan Kopri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung | 70 |
| 11. Pembongkaran bangunan semi-permanen di atas aliran drainase sebagai tindakan korektif pengawasan di Kota Bandar Lampung..... | 71 |
| 12. Kegiatan Pembangunan Drainase di Jalan P. Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung..... | 76 |
| 13. Alur Pengawasan Pembangunan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung..... | 77 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah perkotaan yang masih menghadapi persoalan banjir dan genangan air hingga saat ini. Perkembangan kota yang pesat dalam dua tahun terakhir berdampak pada semakin tingginya kebutuhan ruang untuk permukiman, perdagangan, dan industri. Perubahan tata guna lahan tersebut mendorong terjadinya alih fungsi kawasan resapan air menjadi bangunan, jalan, serta kawasan komersial yang mengurangi kapasitas daerah dalam menampung air hujan (Syaputra dkk., 2025). Akibat kondisi tersebut, pada saat hujan dengan intensitas tinggi muncul genangan dan banjir di berbagai titik rawan, seperti Jalan ZA Pagar Alam serta kawasan Sukarame dan Rajabasa yang kerap dilanda banjir (Kupastuntas, 2025). Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam dan tata ruang, tetapi juga oleh lemahnya fungsi pengawasan (*controlling*) terhadap pembangunan infrastruktur drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung.

Banjir pada aspek sosial berimplikasi pada terganggunya aktivitas masyarakat, khususnya mobilitas dan akses menuju fasilitas umum. Pada aspek ekonomi, peristiwa ini menimbulkan kerugian berupa kerusakan rumah, infrastruktur publik, serta kendaraan. Pada aspek lingkungan, genangan air yang bertahan lama berpotensi menimbulkan berbagai penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah, diare, dan *leptospirosis*. Fenomena banjir di Kota Bandar Lampung berdampak langsung pada menurunnya daya tarik investasi. Kawasan rawan banjir dipersepsikan memiliki risiko tinggi, sehingga investor cenderung berhati-hati dalam menanamkan modal.

Tabel 1. Sebaran Titik Rawan Banjir di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kecamatan Dan Kelurahan.

| Kecamatan | Kelurahan/ Area Rawan Banjir |
|----------------------|---|
| Rajabasa | Rajabasa Induk, Nunyai |
| Kedamaian | Tanjung Gading |
| Teluk Betung Selatan | Gedung Pakuon |
| Sukarame | Waydadi Baru |
| Sukabumi | Campang Raya |
| Panjang | Way Lunik |
| Bumi Waras | Garuntang |
| Kali Balau Kencana | Sungai Kali Balau dan area kanan kiri sungai. |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, 2022–2024

Permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung tidak hanya terfokus pada satu wilayah, tetapi tersebar di berbagai kecamatan. Di Kecamatan Rajabasa, titik rawan banjir terdapat di Kelurahan Rajabasa Induk dan Rajabasa Nunyai yang sering tergenang saat hujan deras. Sementara itu, Kecamatan Kedamaian juga rentan, terutama di Kelurahan Kalibalau Kencana. Di wilayah ini, banjir berulang hampir setiap musim hujan, khususnya di jalan dan gang seperti Jalan Hi. Syarif, Gang Jagal, Gang Sumurputri, Gang Ainan, dan Gang Tarya. Wilayah pesisir Teluk Betung Selatan juga tidak luput dari ancaman banjir.

Kelurahan Gedung Pakuon merupakan salah satu wilayah rawan banjir karena letaknya berada di dataran rendah serta berdekatan dengan garis pantai. Selain itu, beberapa kecamatan lain seperti Sukarame (Kelurahan Way Dadi Baru), Sukabumi (Kelurahan Campang Raya), Panjang (Kelurahan Way Lunik), dan Bumi Waras (Kelurahan Garuntang) juga tercatat sebagai daerah dengan kerentanan banjir yang cukup tinggi. Kerawanan ini terlihat dari luasnya wilayah terdampak serta intensitas kejadian banjir yang terus berulang setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banjir di Kota Bandar Lampung bersifat menyebar dan tidak terpusat pada satu kawasan tertentu. Kondisi tersebut menegaskan bahwa banjir di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh faktor topografi, kapasitas drainase yang terbatas, dan pengelolaan tata ruang yang kurang efektif sehingga berdampak luas di berbagai wilayah.

Tabel 2. Data Kejadian Banjir di Bandar Lampung

| Tahun/Periode | Jumlah Kejadian Banjir | Catatan Terkait |
|-------------------------------|--|--|
| 2010-2019 (10 Tahun) | 14 Kejadian Banjir dari total 26 Bencana Alam) | Risiko Banjir menaik pada tahun tersebut |
| Tahun 2022 | 26 Kejadian Banjir | Tercatat sebagai bagian dari total 164 bencana alam, Korban: 10 luka ringan, 1 luka berat, 2 Meninggal dunia |
| Tahun 2023 (Januari- Agustus) | 13 Kejadian Banjir | Dari Total 96 Bencana Alam |
| Tahun 2024 | 18 Kejadian Banjir | Kejadian tersebar di beberapa kecamatan; puluhan rumah terdampak |
| Tahun 2025 (Februari) | 9 Kejadian Banjir | Banjir besar di beberapa kecamatan ribuan terdampak. |

Sumber: Asbi dkk. (2020)

Data menunjukkan bahwa banjir di Kota Bandar Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010–2019 tercatat 14 kejadian, melonjak menjadi 26 kali pada tahun 2022, dan terus berulang pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor curah hujan dan tata ruang, tetapi juga lemahnya fungsi pengawasan (*controlling*) dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase. Dampaknya pun semakin meluas, Banjir tidak hanya menyebabkan genangan sementara, tetapi juga merusak puluhan rumah warga, mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak lagi dapat dipandang sekadar bencana alam musiman, melainkan sudah menjadi persoalan struktural yang berkaitan dengan lemahnya pengelolaan lingkungan dan tata kota. Lebih mengkhawatirkan lagi, pada awal tahun 2025, dalam kurun waktu dua bulan pertama, sudah tercatat sembilan peristiwa banjir yang menyebabkan ribuan orang terkena dampaknya. Angka ini memperlihatkan adanya percepatan frekuensi dan *eskalasi* dampak bencana, di mana kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan semakin sulit dikendalikan.

Permasalahan banjir berulang di Kota Bandar Lampung menunjukkan lemahnya pembangunan drainase. Pembangunan hanya dilakukan di titik tertentu, saluran tidak terhubung dengan baik, kualitas konstruksi rendah, pemeliharaan kurang maksimal, serta sering tersumbat sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2022 yang menegaskan perlunya rencana Induk Sistem Drainase agar saluran primer, sekunder, dan tersier terhubung secara menyeluruh. Akan tetapi, implementasinya masih lemah, sebagaimana tercermin dalam Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung 2016–2020 yang memetakan banyak kawasan rawan banjir (bpbd.bandarlampungkota.go.id, 2025). Lemahnya fungsi *controlling* menyebabkan banyak proyek drainase tidak sesuai standar teknis, tidak saling terhubung, serta kurang diawasi pascapembangunan, sehingga efektivitasnya rendah.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung merupakan instansi teknis yang memiliki peran penting dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan sistem drainase, jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang berfungsi untuk mengurangi risiko banjir. Secara kelembagaan, Dinas PU menjadi aktor kunci yang menentukan efektivitas pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Dalam pelaksanaannya, Dinas PU menghadapi persoalan anggaran yang masih terbatas. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota hanya mengalokasikan sekitar Rp15 miliar untuk perbaikan drainase di 20 kecamatan, sehingga pengerjaan dilakukan secara bertahap dan hanya pada titik-titik prioritas (Antara News, 2024). Meskipun pada 2025 anggaran meningkat menjadi Rp20–25 miliar, jumlah tersebut tetap belum mampu menjangkau seluruh kawasan rawan banjir di Bandar Lampung (Medialampung.co.id 2025). Selain itu, keterbatasan teknis berupa ketiadaan data topografi beresolusi tinggi menghambat implementasi konsep drainase yang telah disusun Dinas PU, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu (Maulana dkk., 2021).

Koordinasi antar lembaga masih belum terlaksana secara efektif. Penanganan banjir idealnya melibatkan kerja sama antara Dinas PU, BPBD, serta instansi lain yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam praktiknya pembangunan drainase hanya dilakukan di sebagian titik sehingga tidak terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya, meskipun saluran telah dibangun, banjir tetap terjadi karena jaringan drainase tidak saling terhubung. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Ariyanto (2023) yang menunjukkan bahwa kapasitas drainase di kawasan Sukarame tidak mampu menampung debit hujan akibat saluran yang terputus dan tidak terkoneksi. Persoalan lain yang muncul adalah buruknya kualitas konstruksi dan minimnya pemeliharaan. Banyak saluran drainase cepat rusak karena material tidak berkualitas dan lemahnya pengawasan. Kurangnya pembersihan rutin juga menyebabkan saluran tersumbat lumpur dan sampah rumah tangga, sehingga fungsi drainase sebagai pengendali banjir menjadi tidak efektif.

Penelitian Rosanty dkk (2022) menunjukkan bahwa drainase di beberapa wilayah Bandar Lampung, seperti Way Dadi dan Jalan Bahari, sering tidak berfungsi efektif akibat penyumbatan, kebutuhan pelebaran saluran, serta adanya bangunan di atas aliran drainase, yang menandakan lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang kota (bpbdbandarlampungkota.go.id). Fenomena banjir yang semakin sering melanda Kota Bandar Lampung menunjukkan pembangunan drainase belum terlaksana secara efektif, sehingga pengawasan memiliki peran penting di mana Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai instansi teknis berwenang memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur drainase berjalan sesuai standar, serta penguatan fungsi pengawasan menjadi krusial agar sistem drainase dapat berfungsi secara efektif dalam menekan potensi banjir di wilayah perkotaan. Dinas Pekerjaan Umum perlu melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap sistem drainase guna mengidentifikasi serta menangani hambatan yang muncul sejak dini.

Evaluasi tersebut memiliki urgensi karena pengawasan yang konsisten tidak hanya menjamin transparansi penggunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, sistem drainase di Kota Bandar Lampung diharapkan mampu berfungsi secara efektif dalam mengurangi risiko banjir. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa urusan pekerjaan umum merupakan kewenangan pemerintah daerah (Peraturan BPK RI, 2014). Selaras dengan itu, Raharjo dkk. (2023) menekankan bahwa saluran drainase yang tidak dievaluasi secara berkala berpotensi menimbulkan genangan, karena kapasitas saluran sering kali tidak sebanding dengan debit rencana sehingga, diperlukan komitmen kuat dari Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan setiap tahap pembangunan dan pemeliharaan drainase dilaksanakan sesuai standar teknis agar hasilnya berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Fungsi pengawasan ini dibutuhkan karena berbagai program drainase sebelumnya belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Drainase menegaskan pentingnya pengelolaan drainase yang terintegrasi, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan saluran yang dibangun tanpa keterhubungan dengan jaringan lain, serta kualitas konstruksinya rendah sehingga cepat mengalami kerusakan (Kusumadewi dkk.2025). Akibatnya, anggaran yang telah digunakan tidak memberikan manfaat efektif bagi masyarakat. Melalui perannya sebagai instansi teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas PU Kota Bandar Lampung bertanggung jawab melakukan pengawasan, menjamin mutu konstruksi, serta mendorong transparansi pembangunan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat (Kusumadewi dkk., 2025). Efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan (Kusumadewi dkk., 2025).

Pengawasan yang dilakukan Dinas PU diharapkan mampu mewujudkan pembangunan drainase yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim sesuai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Khususnya tujuan 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan serta tujuan 13 tentang penanganan perubahan iklim (United Nations, 2015). Target tersebut belum sepenuhnya tercapai akibat masih adanya persoalan banjir di Kota Bandar Lampung, meskipun anggaran pembangunan drainase telah ditingkatkan (Media Lampung Disway, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Dinas PU sangat menentukan keberhasilan pembangunan drainase, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran serta keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

Akibatnya, risiko terjadinya banjir tetap tinggi, bahkan ketika dana telah dialokasikan secara signifikan. Sehingga, penguatan kapasitas pengawasan menjadi kunci agar pembangunan drainase di Kota Bandar Lampung benar-benar mampu mengurangi risiko banjir, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM Dinas PU, penerapan sistem monitoring berbasis teknologi, koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan. Menurut Stone dkk. (2009) bahwa kontrol yang efektif membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan sistem informasi yang akurat. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, berorientasi pada mitigasi risiko, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, lingkungan, dan perubahan iklim. Selain itu, transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, merupakan prinsip penting sebagaimana diungkapkan Siagian (2008) yang menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel untuk menjamin kualitas hasil. Evaluasi berkala terhadap hasil pembangunan juga penting untuk menilai sejauh mana sistem drainase yang dibangun berfungsi efektif dalam mengendalikan genangan air dan banjir di kawasan perkotaan.

Sehingga, sistem pengawasan yang kuat dan adaptif akan mendorong terciptanya tata kelola pembangunan infrastruktur yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada ketahanan lingkungan jangka panjang. Sehingga pengawasan proyek drainase di Kota Bandar Lampung harus dipandang sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pembangunan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada ketahanan lingkungan jangka panjang sehingga, efektivitas pengawasan drainase menjadi kunci terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Analisis penelitian terdahulu memperlihatkan persoalan utama drainase di Kota Bandar Lampung tidak hanya terkait keterbatasan kapasitas saluran, tetapi juga lemahnya fungsi pengawasan dan pemeliharaan. Penelitian Pratama dkk. (2023) menunjukkan saluran di Jalan Pramuka, Kecamatan Rajabasa, tidak mampu menampung debit rencana sehingga diperlukan perancangan ulang.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan analisis yang tidak hanya menilai pembangunan drainase dari aspek teknis, tetapi juga dari efektivitas pengawasan (*controlling*) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Pengawasan berperan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai standar teknis dan kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2008) bahwa *controlling* bertujuan mengamati pelaksanaan, membandingkan dengan standar, dan melakukan koreksi atas penyimpangan. Selain itu, Stoner, Freeman, dan Gilbert (2009) menegaskan bahwa fungsi *controlling* memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan organisasi dan mengidentifikasi hambatan yang muncul. Dengan landasan teori tersebut, penelitian ini menilai mekanisme, efektivitas, serta faktor yang memengaruhi keberhasilan pengawasan pembangunan drainase di Kota Bandar Lampung. Selain memastikan kesesuaian pelaksanaan pembangunan, pengawasan juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja kontraktor dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Dalam konteks infrastruktur drainase, pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penurunan kualitas konstruksi yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya risiko genangan dan banjir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Drainase, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian pengelolaan drainase secara terstruktur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, hingga pengawasan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar aktivitas pendukung, tetapi menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan prasarana drainase yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah terkait. Sejalan dengan amanat tersebut, fungsi pengawasan (*controlling*) memiliki peran strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum karena melalui fungsi ini dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan drainase berjalan sesuai standar teknis, spesifikasi kerja, rencana anggaran biaya, serta ketentuan keselamatan dan kualitas konstruksi. Fungsi pengawasan mencakup serangkaian kegiatan seperti pemantauan lapangan secara berkala untuk menilai progres fisik pekerjaan, verifikasi kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta evaluasi mutu konstruksi pada setiap tahapan.

Fungsi pengawasan juga meliputi tindakan korektif terhadap potensi penyimpangan teknis maupun administratif yang dapat terjadi di lapangan, baik yang berkaitan dengan kualitas material, ketepatan waktu pelaksanaan, maupun penggunaan anggaran. Melalui proses pengawasan ini, Dinas Pekerjaan Umum memiliki dasar untuk memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan telah mengikuti spesifikasi teknis, standar operasional, dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Penguatan fungsi pengawasan juga memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan proyek, sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya kerusakan dini pada saluran drainase, mengurangi risiko banjir, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur publik.



Gambar 1. Kegiatan pembangunan drainase yang sedang berlangsung di Kecamatan Sukarame.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 1 menunjukkan kegiatan pembangunan drainase yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung di Kecamatan Sukarame. Kehadiran papan peringatan kerja menandakan bahwa proses konstruksi sedang berlangsung dan diawasi oleh petugas lapangan. Aktivitas ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan pekerjaan drainase berjalan sesuai perencanaan teknis dan standar keselamatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi *controlling* (pengawasan) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung terhadap proyek pembangunan drainase?
2. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pengawasan proyek pembangunan drainase di Kota Bandar Lampung

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi *controlling* (pengawasan) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pembangunan drainase serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya mengenai fungsi pengawasan instansi teknis dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perkotaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai fungsi pengawasan instansi teknis dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perkotaan, serta memperluas pemahaman tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas PU Kota Bandar Lampung terhadap proyek pembangunan drainase serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi aplikatif bagi Dinas PU dan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas pembangunan drainase di Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi instansi terkait dalam memperbaiki mekanisme pengawasan, memperkuat koordinasi antar pihak pelaksana, serta memastikan agar pelaksanaan proyek drainase berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kebutuhan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

| No | Penulis/Tahun | Judul | Metode | Hasil Penelitian | Keterkaitan dengan Penelitian |
|----|----------------------------|--|---------------|--|--|
| 1 | Sembiring (2021) | Evaluasi Pengawasan Pembangunan Drainase oleh Dinas PU Kota Medan | Kualitatif | Pengawasan yang lemah menyebabkan kualitas konstruksi rendah dan tidak sesuai standar teknis. | Menjadi dasar empiris bahwa fungsi <i>controlling</i> memengaruhi kualitas drainase. |
| 2 | Siagian (2012) | Manajemen: Suatu Pengantar | Studi Pustaka | <i>Controlling</i> membandingkan kinerja dengan standar dan koreksi bila terjadi penyimpangan. | Menjadi landasan teori <i>controlling</i> dalam pengawasan proyek. |
| 3 | Rahmawati & Firdaus (2020) | Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif <i>Good Governance</i> | Kualitatif | Pengawasan transparan meningkatkan akuntabilitas dan mutu pembangunan. | Mendukung pentingnya pengawasan drainase berbasis akuntabilitas publik. |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Tabel penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan (*controlling*) merupakan aspek yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan drainase. Penelitian Sembiring (2021) menegaskan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan berimplikasi pada kualitas konstruksi yang tidak sesuai standar teknis. Pandangan tersebut sejalan dengan Siagian (2012) yang menjelaskan bahwa *controlling* merupakan proses evaluatif untuk membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan serta melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Selanjutnya, penelitian Rahmawati dan Firdaus (2020) menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan secara transparan, sistematis, dan akuntabel berperan penting dalam menjamin mutu pembangunan infrastruktur serta menjaga keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam proyek pembangunan drainase. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pelaksanaan *controlling* serta hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitasnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja pengawasan pada pembangunan infrastruktur drainase di wilayah perkotaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan drainase perkotaan di Kota Bandar Lampung telah banyak dikaji dari sisi teknis maupun perencanaan, seperti peningkatan kapasitas saluran, perhitungan debit limpasan, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan infrastruktur. Kajian tersebut memberikan pemahaman mengenai aspek teknis dan kelembagaan dalam pembangunan drainase, tetapi aspek pengawasan (*controlling*) dalam pelaksanaan pembangunan masih belum diulas secara mendalam. Fungsi pengawasan memiliki peranan penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan, termasuk dalam menjaga mutu konstruksi serta efektivitas penggunaan anggaran.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena fokus utama diarahkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan (*controlling*) oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan drainase. Kajian ini tidak hanya melihat aspek teknis pelaksanaan proyek, tetapi juga menelaah hubungan antara perencanaan, regulasi, dan implementasi kebijakan daerah dalam proses pengawasan. Analisis dilakukan untuk menilai efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan di lapangan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan pembangunan drainase serta memperkaya kajian akademik mengenai peran fungsi *controlling* dalam mewujudkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris terhadap upaya peningkatan tata kelola proyek infrastruktur daerah melalui pendekatan evaluatif terhadap kinerja instansi pelaksana. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan perkotaan. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan teknis yang selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam menilai efektivitas pengawasan pembangunan drainase di Kota Bandar Lampung. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur kebijakan publik, khususnya dalam konteks implementasi pengawasan proyek infrastruktur daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada efektivitas pengawasan dan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur publik.

2.2 Tinjauan tentang Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan salah satu kerangka penting dalam mengelola organisasi, baik sektor privat maupun publik. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penyusunan strategi, tetapi juga mencakup keseluruhan proses yang melibatkan perumusan tujuan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi terhadap hasil yang dicapai (Hardjati dkk, 2023). Selain itu, manajemen strategis berfungsi sebagai alat untuk memastikan agar setiap aktivitas organisasi selaras dengan visi, misi, serta nilai-nilai inti yang dianut. Melalui pendekatan ini, organisasi mampu mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal sekaligus mengoptimalkan potensi internal untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Hoglund dkk, 2018). Dalam manajemen, terdapat empat fungsi utama yang sering dikenal dengan singkatan POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan menetapkan arah dan tujuan organisasi serta strategi yang akan ditempuh. Pengorganisasian bertujuan untuk menyusun struktur kerja, membagi peran, dan mengalokasikan sumber daya agar setiap individu memahami tanggung jawabnya. Pelaksanaan atau penggerakan memastikan strategi berjalan melalui arahan, komunikasi, dan motivasi kepada sumber daya manusia. Terakhir, pengawasan berperan memantau jalannya kegiatan, mendeteksi penyimpangan, dan memberikan dasar bagi perbaikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Tanpa kontrol yang efektif, strategi yang telah disusun berisiko tidak terealisasi dengan baik. Dalam konteks pembangunan drainase di Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum berperan memastikan setiap tahapan mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur drainase dilaksanakan sesuai standar. Selain itu, pengawasan juga menjadi sarana untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga, pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan proyek serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya pembangunan.

2.3 Tinjauan tentang Fungsi Pengawasan

2.3.1 Definisi Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran vital dalam memastikan agar seluruh kegiatan organisasi dapat berlangsung sesuai dengan rencana, kebijakan, serta prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pengawasan, pimpinan organisasi memperoleh gambaran nyata mengenai sejauh mana pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan, serta dapat mendeteksi sedini mungkin adanya potensi penyimpangan yang terjadi di lapangan. Dengan adanya mekanisme pengawasan, organisasi tidak hanya mampu menjaga keteraturan dan kepatuhan prosedural, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan. Teori pengawasan menegaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang terintegrasi dalam setiap tahapan manajemen, di mana aktivitas yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pencarian kesalahan, tetapi juga diarahkan pada upaya perbaikan berkelanjutan (Siagian, 2012).

Selanjutnya, Terry (2006) menyatakan bahwa pengawasan merupakan usaha untuk menilai hasil yang telah dicapai, membandingkannya dengan standar yang ditetapkan, serta mengambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Sejalan dengan itu, Fayol (1916) menempatkan pengawasan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa segala aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan instruksi. Sementara itu, Manullang (2001) menekankan bahwa pengawasan berfungsi menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkannya terhadap rencana yang telah dibuat, sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian (2012) sebagai rujukan utama, karena secara komprehensif menekankan bahwa pengawasan bukan hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, tetapi juga diarahkan pada proses perbaikan berkelanjutan yang relevan dengan tujuan pembangunan daerah.

2.3.2 Model-Model Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi atau pemerintahan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program, kebijakan, maupun kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, serta standar yang telah ditetapkan (Siagian, 2008). Dalam kajian ilmu administrasi dan manajemen publik, terdapat beberapa model pengawasan yang dikembangkan oleh para ahli, di antaranya adalah model pengawasan preventif, represif, melekat, fungsional, serta pengawasan masyarakat.

1. Model Pengawasan Preventif

Model pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal pelaksanaan. Menurut Indrawijaya (2010), pengawasan preventif memiliki peran strategis dalam menekan risiko kesalahan, karena dilakukan melalui penetapan prosedur, pemberian petunjuk teknis, maupun verifikasi dokumen sebelum kegiatan dijalankan. Sehingga, model pengawasan ini lebih menekankan pada upaya pencegahan dibandingkan perbaikan.

2. Model Pengawasan Represif

Model pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan. Fokusnya adalah untuk menemukan penyimpangan, kesalahan, ataupun ketidaksesuaian yang telah terjadi (Handyaningrat, 1994). Hasil pengawasan ini biasanya dituangkan dalam bentuk laporan temuan, rekomendasi perbaikan, maupun tindak lanjut untuk mencegah terulangnya kesalahan di kemudian hari.

3. Model Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan melekat adalah pengawasan internal oleh atasan langsung terhadap bawahan sehari-hari, yang bersifat kontinu sehingga memungkinkan evaluasi dan pembinaan segera bila terjadi penyimpangan (Siagian, 2008). Sehingga, pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme preventif sekaligus korektif untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

4. Model Pengawasan Fungsional

Model pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga atau aparat pengawasan yang memiliki fungsi khusus di bidang pengawasan. Misalnya, Inspektorat Daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Atmosudirdjo (2001), pengawasan fungsional lebih bersifat independen karena dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan keahlian khusus dalam bidang pengawasan.

5. Model Pengawasan oleh Masyarakat (*Sosial Control*)

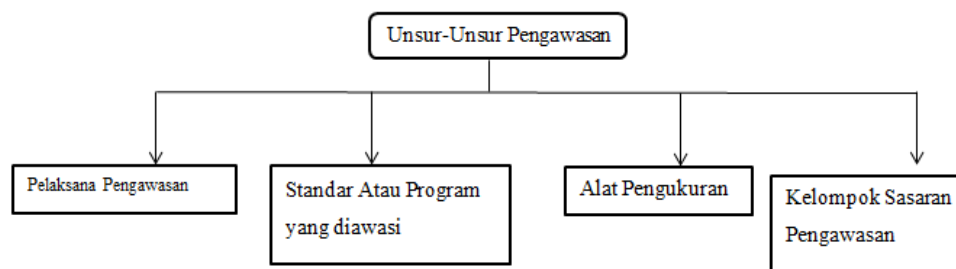
Selain pengawasan internal dan fungsional, terdapat pula pengawasan eksternal yang berasal dari masyarakat. Menurut Dwiyanto (2008), pengawasan masyarakat menjadi penting untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Masyarakat dapat berperan melalui mekanisme partisipasi, media massa, maupun organisasi masyarakat sipil dalam memberikan masukan, kritik, ataupun laporan terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.3 Unsur-Unsur dalam Fungsi Pengawasan

Dalam konteks pengawasan kebijakan publik, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif. Unsur-Unsur Tersebut Meliputi :

Menurut Siagian (2008), unsur pengawasan terdiri atas pelaksana pengawasan, standar atau program yang diawasi, alat pengukuran, tindakan korektif, serta kelompok sasaran pengawasan. Sementara itu, Handayani (1996) menyebutkan bahwa unsur pengawasan meliputi pelaksana, objek atau kegiatan yang diawasi, metode pengawasan, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan. Menurut Nugroho (2012), pengawasan yang efektif mencakup unsur subjek pengawasan, objek pengawasan, tujuan pengawasan, serta instrumen pengawasan yang digunakan. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa setiap ahli memiliki penekanan berbeda dalam melihat fungsi pengawasan. Unsur pengawasan pada dasarnya mencakup subjek, objek, instrumen, serta tindak lanjut agar pelaksanaannya berjalan efektif dan mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disintesis bahwa unsur-unsur pokok dalam pengawasan kebijakan publik mencakup pelaksana atau subjek pengawasan, program atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, kelompok sasaran pengawasan, serta mekanisme atau instrumen yang digunakan untuk menjamin efektivitas proses pengawasan. Berbagai pendapat tersebut, unsur pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian (2008) dinilai cukup relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, sebab unsur-unsur yang ditawarkan lebih rinci dan sesuai dengan konteks pengawasan teknis pembangunan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Hal ini penting karena pembangunan infrastruktur drainase membutuhkan pengawasan yang terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap tahapan pelaksanaan sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku. Selain itu, keberadaan tindakan korektif dalam unsur pengawasan juga menjadi aspek penting untuk memastikan setiap permasalahan atau penyimpangan yang muncul dapat segera diatasi.



Siagian, S. P. (2008).

Gambar 2. Unsur-Unsur dalam Pengawasan

Sumber: Siagian, S. P, 2008

2.4 Tinjauan tentang Fungsi dan Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Proyek Pembangunan Drainase

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas PU melaksanakan pembangunan drainase untuk meningkatkan kapasitas saluran dan mengurangi risiko banjir. Upaya ini bertujuan mengatasi permasalahan genangan di berbagai wilayah kota. Dinas PU juga bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan teknis, dan pemeliharaan agar proyek sesuai standar serta regulasi. Pembangunan drainase tersebut diarahkan agar selaras dengan prinsip tata ruang perkotaan yang berwawasan keberlanjutan. Sehingga, pembangunan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

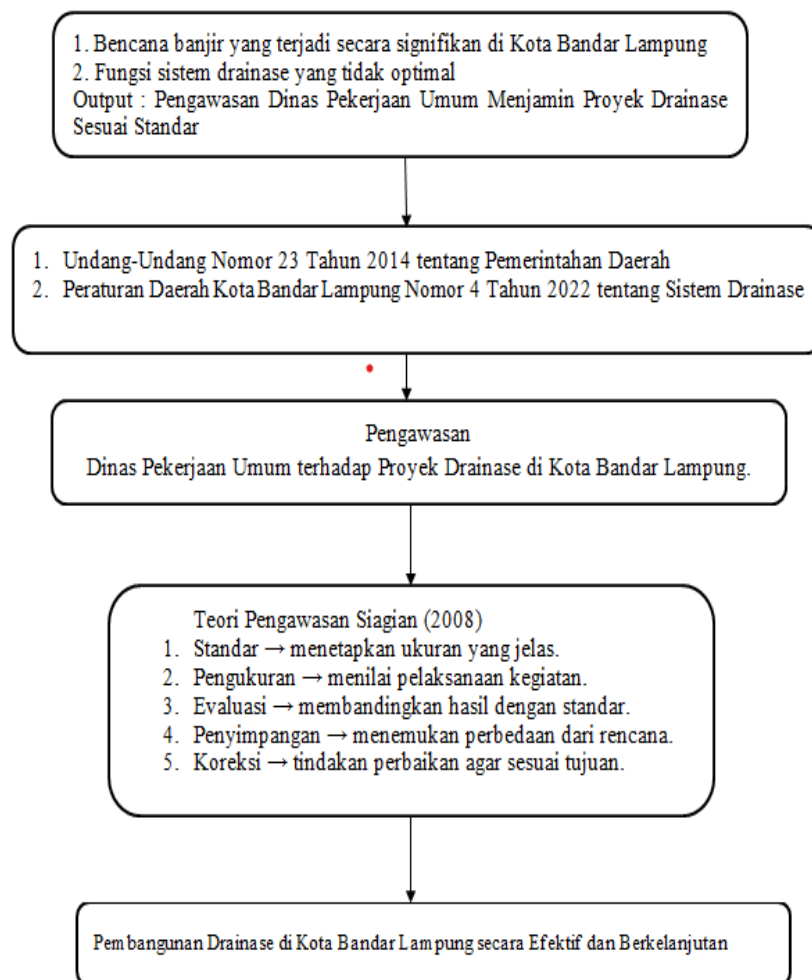
Pembangunan drainase ini direncanakan melalui berbagai regulasi dan rencana strategis, antara lain Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Drainase dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021–2026. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari program penataan kota dan pengurangan risiko bencana yang digagas oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pelaksanaan proyek drainase dilakukan untuk menekan risiko banjir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memperbaiki pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Melalui proyek ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur, terutama dalam aspek akses transportasi, keselamatan, dan kesehatan lingkungan. Pengawasan proyek drainase mengacu pada indikator teknis yang ditetapkan oleh Dinas PU, dengan tujuan mewujudkan sistem drainase yang aman, tertata, dan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan juga menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek terhadap rencana awal serta mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Pembangunan drainase tidak hanya dipandang sebagai kegiatan fisik, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di Kota Bandar Lampung membutuhkan sinergi antara Dinas PU sebagai instansi teknis, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dinas PU memiliki peran sentral dalam memastikan setiap rencana teknis drainase sesuai dengan kondisi lapangan, prioritas wilayah, serta standar yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan Dinas PU mencakup aspek kualitas konstruksi, kesesuaian desain, transparansi pelaksanaan, hingga ketepatan penggunaan anggaran. Dasar hukum pelaksanaan fungsi pengawasan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi teknis yang ditetapkan pemerintah daerah. Melalui perannya, Dinas PU memastikan bahwa pembangunan drainase berjalan sesuai perencanaan, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang konsisten membantu mendeteksi masalah sejak awal sehingga dapat segera ditangani. Partisipasi masyarakat juga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan proyek.

Keberhasilan pembangunan drainase tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam memberikan informasi mengenai titik-titik rawan banjir, kondisi lingkungan, dan potensi hambatan yang mungkin muncul selama pembangunan. Dukungan masyarakat terlihat dalam kegiatan pemeliharaan rutin, seperti membersihkan saluran, menjaga fasilitas drainase dari penyumbatan, atau melaporkan kerusakan, sehingga fungsi drainase tetap terjaga dan berkelanjutan. Partisipasi aktif ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kualitas dan fungsi infrastruktur publik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas tidak hanya menjamin efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek yang dibangun. Dengan adanya sinergi tersebut, pembangunan drainase dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat ketahanan kota terhadap ancaman banjir. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap, melainkan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

2.5 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa keberhasilan pembangunan drainase tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan instansi terkait. Pengawasan berperan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhir pembangunan. Kelemahan dalam pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan pekerjaan serta menurunkan kualitas infrastruktur yang dihasilkan.



Gambar 3. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik suatu fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif menekankan pada upaya mengungkap kenyataan sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, fokus penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan kondisi aktual implementasi pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung terhadap pembangunan drainase, termasuk berbagai permasalahan dan tantangan yang menyertainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dinilai paling sesuai untuk memahami dinamika sosial, interaksi antarpelaku, serta makna di balik tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dinas PU. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, tidak menggunakan prosedur analisis statistik, serta dilakukan dalam kondisi objek yang alamiah (*natural setting*), di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam dari para informan yang terlibat langsung. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengawasan drainase di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap realitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Analisis data bersifat induktif, artinya berpijak pada fakta-fakta di lapangan untuk kemudian dikembangkan menjadi pola, kategori, atau makna tertentu. Pemilihan jenis dan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, mendalam, dan kontekstual mengenai peran dan efektivitas Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam mengawasi pembangunan drainase. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali secara lebih detail realitas sosial, tantangan kelembagaan, serta keterkaitan antara proses pengawasan, kebijakan publik, dan prinsip *good governance* dalam konteks pembangunan infrastruktur drainase yang berkelanjutan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini, yaitu:

- a. Menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung terhadap proyek pembangunan drainase, dengan menggunakan kerangka teori pengawasan Siagian (2008) yang terdiri dari lima indikator utama, yaitu:
 1. Standar merupakan ukuran atau kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam konteks proyek pembangunan drainase, standar mencakup ketentuan teknis dan administrasi yang telah disepakati sejak tahap perencanaan. Penetapan standar ini penting agar setiap tahapan pekerjaan memiliki acuan yang jelas dan dapat dijadikan dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
 2. Pengukuran dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan pembangunan drainase telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mencakup berbagai aspek teknis dan administratif yang diatur dalam dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses ini meliputi pemeriksaan

langsung di lapangan, peninjauan laporan kemajuan pekerjaan, serta pengecekan hasil sementara proyek.

3. Evaluasi merupakan kegiatan membandingkan hasil pelaksanaan proyek dengan standar yang telah menjadi acuan. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek serta menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang belum sesuai rencana.
4. Penyimpangan adalah perbedaan antara hasil pelaksanaan di lapangan dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Penyimpangan dapat berupa keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian material, atau penurunan kualitas hasil kerja.
5. Koreksi merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Langkah koreksi dapat berupa instruksi perbaikan, penyesuaian metode pelaksanaan, atau peningkatan pengawasan di lapangan agar pelaksanaan proyek kembali sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

b. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem drainase di Kota Bandar Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan fokus pada kegiatan pembangunan drainase yang sedang berlangsung di Kecamatan Sukarame. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah pelaksanaan pembangunan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai upaya meningkatkan kapasitas saluran air dan mengurangi potensi genangan di kawasan permukiman.

Kecamatan Sukarame merupakan kawasan yang mengalami permasalahan drainase, seperti kapasitas saluran yang terbatas serta aliran air yang kurang lancar ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya kegiatan pembangunan drainase di wilayah tersebut. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih sebagai fokus penelitian untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam proyek pembangunan drainase, mulai dari proses pelaksanaan pekerjaan hingga kesesuaian dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan pembangunan drainase yang sedang berlangsung di Kecamatan Sukarame dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur drainase di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara lebih jelas bagaimana proses pengawasan dilakukan serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan pada proyek pembangunan drainase tersebut.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan interaksi dengan pejabat serta staf Dinas PU Kota Bandar Lampung, pihak teknis, dan masyarakat di wilayah rawan banjir untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan fungsi pengawasan. Data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, arsip pemerintah daerah, serta literatur terkait yang berfungsi memperkuat analisis, memberikan kerangka normatif, dan membandingkan temuan lapangan sehingga hasil penelitian lebih komprehensif.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari manusia sebagai sumber informasi. Data ini dikumpulkan peneliti melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman nyata mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan drainase.

- b. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat dan staf Dinas PU Kota Bandar Lampung yang terlibat dalam proyek pembangunan drainase, pengawas lapangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi, serta masyarakat di wilayah rawan banjir sebagai pihak yang merasakan langsung manfaat maupun kendala dari sistem drainase yang dibangun.
- c. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data ini mencakup literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, laporan tahunan Dinas PU Kota Bandar Lampung, regulasi, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu yang diteliti.

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

| | Nama Informan | Jabatan / Posisi | Informasi yang Ingin Dicari |
|-----------|----------------------|--|--|
| 1. | Nurlasih | Sekretaris Kepala Bagian Dinas PU Kota Bandar Lampung | Kebijakan pengelolaan drainase, arah prioritas pembangunan, mekanisme pengawasan tingkat instansi. |
| 2. | Nila Yusliyawati | Sekretaris Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kota Bandar Lampung | Perencanaan teknis, penetapan standar konstruksi, prosedur pengendalian mutu. |
| 3. | Oky Wijaya | Pengawas Lapangan Dinas PU Kota Bandar Lampung | Pelaksanaan pengawasan lapangan, kesesuaian pekerjaan dengan RAB dan gambar kerja, hambatan pelaksanaan. |
| 4. | Irfan Tri Musri | Ketua WALHI Lampung | Pandangan kritis terkait dampak lingkungan, partisipasi publik, keberlanjutan program drainase. |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data langsung di lapangan mengenai kondisi sistem drainase dan wilayah-wilayah rawan banjir di Kota Bandar Lampung. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat melihat secara nyata permasalahan yang ada serta faktor-faktor yang memengaruhi fungsi saluran. Tahap observasi mencakup:

1. Kondisi fisik saluran drainase di beberapa titik rawan banjir, khususnya di Kelurahan Kedamaian dan Kelurahan Kampung Baru.
2. Kondisi lingkungan sekitar drainase, termasuk adanya tumpukan sampah, sedimentasi, atau penyempitan saluran.
3. Respons dan aktivitas masyarakat serta aparat pemerintahan dalam menghadapi kejadian banjir.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi, arsip, serta sumber tertulis lainnya yang mendukung analisis. Dokumen-dokumen yang dikaji dalam penelitian ini antara lain:

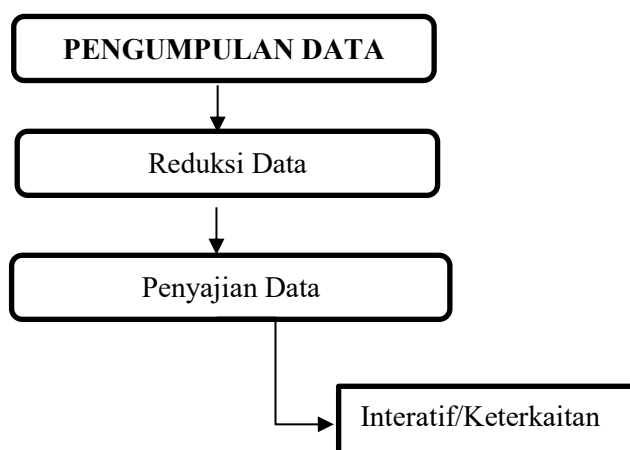
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem drainase Kota Bandar Lampung

1. Laporan pembangunan drainase yang disusun oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung.
2. Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) PU, khususnya bidang sumber daya air dan penataan drainase.
3. Peta sebaran wilayah rawan banjir di Kota Bandar Lampung.
4. Dokumentasi visual, berupa foto kondisi drainase dan lokasi yang terdampak banjir.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu proses untuk mencari, menata, dan mengorganisasikan data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data serta memudahkan penarikan kesimpulan yang bermakna. Menurut Sugiyono (2023), analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, baik selama maupun setelah pengumpulan data, hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi yang saling berkaitan secara siklus. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian.

(Model interaktif miles dan huberman)



Miles & Huberman (1994)

Gambar 4. Komponen dalam Analisis Data

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada aspek yang penting, serta mencari tema dan pola dalam data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data tanpa menghilangkan makna inti, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis informasi. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fenomena yang diteliti, mempermudah identifikasi hubungan antarvariabel, serta membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian lebih lanjut. Selain itu, reduksi data juga mempermudah penyajian hasil penelitian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel, diagram, atau model konseptual.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, maupun bagan yang memudahkan peneliti dalam memahami kondisi lapangan. Dengan penyajian data, peneliti dapat melihat gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini merupakan proses mencari makna data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang muncul masih bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti baru. Sehingga, kesimpulan awal tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai data dianggap jenuh. Hubungan antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan membentuk suatu siklus yang tidak terpisahkan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data memiliki peranan yang sangat penting karena hasil penelitian tidak hanya diukur dari banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi juga dari sejauh mana data tersebut dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, serta benar-benar mencerminkan kenyataan empiris di lapangan. Oleh karena itu, peneliti mengacu pada empat kriteria keabsahan data yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, yang semuanya saling berkaitan dan menjadi pedoman utama dalam menjamin kualitas penelitian. Keempat kriteria tersebut berfungsi sebagai standar ilmiah agar penelitian ini tidak hanya sah secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber, metode, serta pengecekan ulang hasil wawancara dan observasi agar setiap temuan dapat diverifikasi dan mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, proses analisis data dilakukan secara terus-menerus dan reflektif sejak tahap pengumpulan hingga penarikan kesimpulan guna meminimalisasi bias subjektivitas peneliti dan memastikan interpretasi data tetap sesuai dengan konteksnya.

3.7.1 Kredibilitas

Kredibilitas mengacu pada tingkat kebenaran atau kepercayaan terhadap data penelitian. Untuk menjaganya, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan di lapangan agar memahami konteks secara mendalam, menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta memanfaatkan berbagai informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi BPBD Kota Bandar Lampung. Selain itu, dilakukan *member check* dengan mengonfirmasi hasil sementara kepada informan guna memastikan kesesuaian data.

3.7.2 Transferabilitas

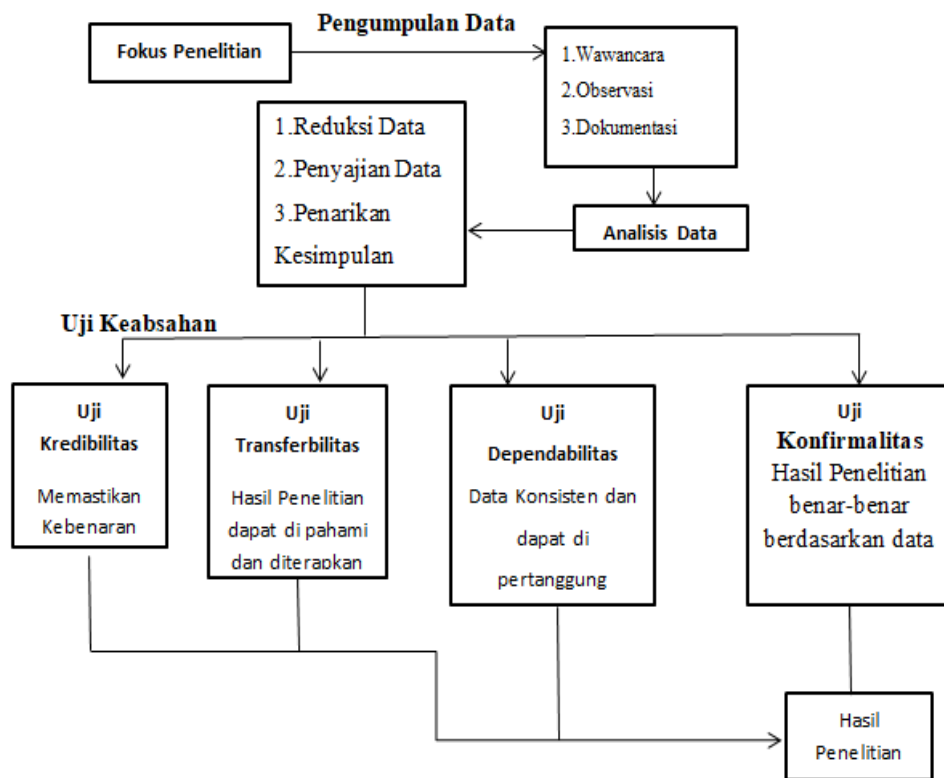
Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk itu, peneliti menyajikan deskripsi rinci mengenai lokasi, kondisi sosial masyarakat, serta permasalahan drainase yang dikaji. Penyajian data yang detail memungkinkan peneliti lain menilai relevansi hasil penelitian bagi daerah yang memiliki permasalahan sejenis, sehingga transferabilitas dapat tercapai dan manfaat penelitian menjadi lebih luas.

3.7.3 Dependabilitas

Dependabilitas menekankan pada konsistensi data penelitian. Artinya, data yang diperoleh dapat dianggap andal apabila proses pengumpulan dan analisis dilakukan secara sistematis. Untuk menjamin dependabilitas, peneliti menyusun catatan yang rinci mengenai seluruh langkah penelitian, mulai dari perencanaan, pemilihan informan, teknik pengumpulan data, hingga proses analisis. Catatan ini berfungsi sebagai jejak audit (*audit trail*) yang memungkinkan pihak lain melakukan penelusuran terhadap proses penelitian.

3.7.4 Konfirmabilitas

Konfirmabilitas merupakan salah satu kriteria utama dalam menjamin keabsahan data penelitian kualitatif. Konsep ini menekankan bahwa setiap temuan penelitian harus benar-benar bersumber dari data empiris yang diperoleh di lapangan, bukan dari asumsi, persepsi, ataupun subjektivitas peneliti semata. Sehingga, hasil penelitian dapat diuji kembali dan diverifikasi oleh pihak lain berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Untuk menjaga konfirmabilitas, peneliti harus mampu menunjukkan jejak proses penelitian secara jelas, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Jejak tersebut biasanya berupa rekaman wawancara, transkrip, catatan lapangan, serta dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan fokus penelitian.



Gambar 5. Bagan Metode Penelitian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan proyek pembangunan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan (controlling) telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari lima indikator pengawasan menurut Siagian (2008), yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, evaluasi, identifikasi penyimpangan, dan tindakan korektif. Penetapan standar pengawasan telah tersedia melalui dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Drainase. Standar tersebut menjadi pedoman bagi Dinas PU dan kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan drainase, namun penerapannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten.

Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui monitoring lapangan terhadap progres pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa kesesuaian pekerjaan terhadap spesifikasi teknis dan kondisi lapangan. Akan tetapi, pengawasan belum dapat menjangkau seluruh titik proyek secara maksimal karena keterbatasan intensitas pemantauan dan jumlah pengawas. Evaluasi pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui koordinasi internal dan pemeriksaan hasil pekerjaan kontraktor, tetapi masih bersifat informal dan belum memiliki mekanisme evaluasi yang terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya beberapa penyimpangan, seperti kualitas pekerjaan yang belum sesuai standar dan masih terjadinya genangan air pada beberapa lokasi drainase.

Tindakan korektif dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui arahan langsung kepada kontraktor untuk melakukan perbaikan pada bagian pekerjaan yang bermasalah. Namun, tindakan korektif tersebut masih bersifat situasional dan belum didukung prosedur korektif yang baku. Selain itu, pelaksanaan pengawasan pembangunan drainase dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengawas, keterbatasan anggaran, kondisi lapangan yang kompleks, serta belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara pengawas lapangan dan kontraktor pelaksana. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut perbaikan belum berjalan secara maksimal pada seluruh titik proyek.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan drainase di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Penguatan penerapan standar pengawasan

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung disarankan untuk memperkuat penerapan standar pengawasan yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara konsisten di seluruh lokasi pembangunan drainase. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penegasan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan standar operasional pengawasan, serta penyesuaian penerapan standar dengan karakteristik dan kompleksitas masing-masing lokasi pekerjaan tanpa mengabaikan ketentuan teknis yang berlaku.

2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengukuran pelaksanaan pekerjaan

Pengukuran pelaksanaan pekerjaan perlu ditingkatkan baik dari segi intensitas maupun kedalaman pengawasan pada setiap tahapan pekerjaan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung disarankan untuk memastikan bahwa pengukuran tidak hanya berfokus pada progres fisik, tetapi juga mencakup aspek kualitas teknis pekerjaan secara berkelanjutan, sehingga potensi ketidaksesuaian dapat teridentifikasi sejak tahap awal pelaksanaan.

3. Penguatan evaluasi sebagai instrumen pengendalian mutu
Evaluasi pelaksanaan pembangunan drainase perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian target administratif dan progres pekerjaan, tetapi juga pada penilaian kualitas hasil pekerjaan dan keberlanjutan fungsi drainase. Evaluasi yang lebih komprehensif diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pelaksanaan pengawasan dan perbaikan pekerjaan.
4. Peningkatan kemampuan identifikasi penyimpangan secara dini
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan kemampuan pengawas dalam mengidentifikasi penyimpangan secara lebih dini dan berkelanjutan.
5. Penguatan tindakan koreksi yang terintegrasi dan berkelanjutan
Tindakan koreksi yang dilakukan terhadap penyimpangan pekerjaan perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan pembangunan drainase. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung disarankan untuk memastikan bahwa setiap tindakan koreksi diikuti dengan pemantauan lanjutan guna menjamin efektivitas perbaikan serta mencegah terulangnya permasalahan yang sama.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya :

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memfokuskan kajian pada pelaksanaan fungsi pengawasan (controlling) pembangunan drainase di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus tersebut belum mencakup analisis dampak jangka panjang terhadap kinerja sistem drainase maupun pengukuran kuantitatif terhadap tingkat efektivitas pengawasan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji hubungan antara intensitas pengawasan dengan kualitas konstruksi dan keberlanjutan fungsi drainase dalam jangka menengah dan panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, R. (2019). Peran strategis pengawasan dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 88–97. <https://doi.org/10.31289/jap.v10i2.3456>
- Andika Pratama, A., Sumiharni, S., & Febrina, R. (2023). Evaluasi kapasitas saluran drainase di Kecamatan Rajabasa menggunakan EPA SWMM. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 11(2), 45–57. <https://doi.org/10.35472/jtsl.v11i2.9876>
- Antara News. (2024, Juli 15). *Pemkot Bandar Lampung anggarkan Rp15 miliar untuk perbaikan drainase*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com>
- Ariyanto, R. (2023). *Evaluasi efektivitas saluran drainase di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan*, 6(2), 77–86.
- Asni, D., & Chairunnisa, C. (2023). Pengorganisasian dalam implementasi manajemen strategis sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 33–47. <https://doi.org/10.31289/jap.v14i1.12345>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pemerintahan daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, P. (2001). *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. (2022–2024). *Laporan data kejadian bencana banjir Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: BPBD.
- BPBD Kota Bandar Lampung. (2025). *Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung 2016–2020*. Diakses dari <https://bpbd.bandarlampungkota.go.id>
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung. (2023). *Laporan proyek pembangunan drainase Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Dinas PUPR.
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. (2025). *Dokumen pelaksanaan pengawasan pembangunan drainase*. Bandar Lampung.

- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Febriana, R., Sumiharni, S., & Andika Pratama, A. (2023). *Evaluasi kapasitas saluran drainase di Kecamatan Rajabasa menggunakan EPA SWMM*. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 11(2), 45–57
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Indrawijaya, I. (2010). *Perilaku organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kupastuntas. (2025, Februari 12). *Banjir landa kawasan Sukarame dan Rajabasa di Bandar Lampung*. Diakses dari <https://www.kupastuntas.co>
- Kusumadewi, E., dkk. (2025). *Implementasi pengawasan pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan*. *Jurnal Kebijakan Publik Daerah*, 11(1), 33–47
- Lestari, D., & Putra, R. A. (2021). *Evaluasi efektivitas tindakan korektif dalam pengawasan proyek infrastruktur perkotaan*. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 8(2), 115–126.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(85\)90062-8](https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8)
- Maulana, R., dkk. (2021). *Pemodelan topografi drainase kota berbasis GIS*. *Jurnal Teknik Sipil Indonesia*, 9(3), 115–124.
- Media Lampung. (2025, September 1). *Anggaran drainase Bandar Lampung naik jadi Rp25 miliar*. Diakses dari <https://medialampung.co.id>
- Medialampung Disway. (2025, 15 September). *Anggaran penanganan banjir Bandar Lampung meningkat menjadi Rp20 miliar*. <https://medialampung.disway.id>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustikasari, D. (2021). *Kepemimpinan, komunikasi, dan koordinasi dalam implementasi strategi organisasi publik*. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(2), 101–114. <https://doi.org/10.31289/jmp.v9i2.5678>

- Nugroho, A., & Lestari, S. (2020). Evaluasi pengawasan proyek infrastruktur daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145–156.
- Nugroho, R., & Lestari, D. (2020). *Evaluasi proyek infrastruktur daerah sebagai instrumen pengendalian kualitas pembangunan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123–135.
- Nursella, A., & Ariyanto, R. (2025). Analisis kapasitas saluran drainase permukiman di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan*, 7(1), 55–67. <https://doi.org/10.35472/jil.v7i1.7654>
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2022). *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Drainase*. Bandar Lampung.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021–2026.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Drainase.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- Prasetyo, D. (2021). Pengaruh pengawasan terhadap kualitas proyek konstruksi pemerintah. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 23(1), 33–42.
- Pratama, A., & Suryani, L. (2020). Penerapan standar pengawasan dalam pembangunan infrastruktur daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 45–56.
- Putra, A. R., & Wahyuni, S. (2020). *Pengawasan pembangunan infrastruktur daerah dalam perspektif manajemen publik*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 45–56.
- Putra, R. A., & Wahyuni, T. (2020). Fungsi controlling dalam manajemen proyek pembangunan. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 12–21.
- Putri, R., & Ramadhan, F. (2021). Evaluasi pengawasan proyek konstruksi terhadap kualitas hasil pekerjaan. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 9(1), 67–78.
- Raharjo, B., dkk. (2023). *Evaluasi sistem drainase perkotaan terhadap curah hujan ekstrem*. *Jurnal Hidrologi Terapan*, 5(4), 221–230.

- Rahman, F., Utami, N., & Kurniawan, D. (2019). Penyimpangan pelaksanaan proyek infrastruktur perkotaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(3), 201–213.
- Rosanty, L., dkk. (2022). *Analisis fungsi drainase dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Teknik Kota*, 10(1), 56–68.
- Salam, R., dkk. (2025). *Drainase perkotaan: Konsep, perencanaan, dan pengelolaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santoso, B., & Hidayat, M. (2020). Faktor penyebab penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur perkotaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(3), 210–221.
- Sari, M., & Hidayat, R. (2019). Implementasi standar teknis dalam proyek konstruksi pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 98–108.
- Setiawan, R., Lestari, D., & Prabowo, H. (2024). Pengawasan dan pengendalian mutu dalam implementasi strategi organisasi publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 77–91. <https://doi.org/10.31289/jkp.v12i1.8765>
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2012). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, B. (2021). Penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(2), 119–128. <https://doi.org/10.31289/jtl.v8i2.6543>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, & Suryanto. (2018). *Manajemen Pengawasan Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Syaputra, A., dkk. (2025). *Analisis perubahan tata guna lahan dan dampaknya terhadap banjir di Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Geografi dan Lingkungan*, 12(1), 45–58.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: UNDP.
<https://digitallibrary.un.org/record/207652>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Wibowo, A., & Nugroho, S. (2019). Pengaruh pengukuran dan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan proyek konstruksi. *Jurnal Teknik Infrastruktur*, 5(2), 89–101.
- Wibowo, A., & Santoso, B. (2021). Tindakan korektif dalam pengawasan proyek konstruksi. *Jurnal Manajemen Konstruksi*, 10(1), 55–66.
- Yuliana, D. (2022). *Analisis kelembagaan dalam pengelolaan drainase perkotaan di Kota Metro*. *Jurnal Manajemen Infrastruktur*, 8(1), 66–75.